

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menggariskan bahwa melalui otonomi, maka daerah diberi wewenang yang luas menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, baik dalam urusan pemerintah maupun memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap daerah dirasa lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerah, yang mempunyai peluang untuk dikembangkan, dan apa yang menjadi kekurangan dari masing – masing daerah untuk selanjutnya diperbaiki.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu : “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama.

Penyelenggaraan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, sehingga aspirasi dan

kebutuhan masyarakat di daerah benar – benar dapat terpenuhi. Hal ini memerlukan penanganan serius agar implementasi otonomi daerah bisa berhasil, termasuk penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah. Dengan demikian, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang dalam hal pembiayaan pembangunan. Hal tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu tingginya kemandirian di suatu daerah. Salah satu tolak ukur keberhasilan kemandirian otonomi daerah dapat dilihat dari hasil pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan manifestasi dari sumber penerimaan daerah termasuk hal pembiayaan pembangunan. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga Pemerintah Provinsi maupun pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak berwenang mengatur dan menentukan penggunaan sumber penerimaan daerah tersebut. Berkaitan dengan sumber – sumber penerimaan daerah, Pasal 285 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah ;
 - b. Hasil retribusi daerah ;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 - d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan transfer ; dan
3. Lain – lain pendapatan yang sah

Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Jawa Tengah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah. Pemerintah daerah Kota Surakarta dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari penerimaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari retribusi daerah.

Restribusi daerah di Kota Surakarta memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah setelah pajak daerah yakni 21.70% . Berikut Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta tahun 2013 :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Tahun 2013

No.	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah (Rp)	Presentase
1.	Pajak Daerah	193.906.210.948	64.98 %
2.	Retribusi Daerah	64.767.799.578	21.70%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.244.980.845	2.76%
4.	Lain – lain pendapatan yang sah	31.481.855.261	10.55%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

Restribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan kebijakan retribusi daerah berdasar prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011). Restribusi Daerah perlu dikelola dengan baik agar dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah maka Kota Surakarta membuat target penerimaan retribusi daerah dari masing – masing SKPD setiap tahun. Berikut gambaran target penerimaan retribusi daerah tahun 2013 :

Tabel 1.2
Target Penerimaan Restribusi Daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2013

No	SKPD	Target (Rp)
1.	DISDIKPORA	2.060.000.000
2.	Dinas Pengelola Pasar	13.474.142.000
3.	Dinas Tata Ruang Kota	14.000.000.000
4.	DISHUBKOMINFO	10.500.000.000
5.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	4.300.000.000
6.	Dinas Pertanian	610.000.000
7.	Dinas Pekerjaan Umum	2.500.000.000
8.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.200.000.000
9.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.000.000.000
10.	Badan Lingkungan Hidup	700.000.000
11.	Dinas Kesehatan	4.500.000.000
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	175.000.000

Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/1-1/1/2013

Salah satu retribusidaerah Pemerintah Kota Surakarta berasal dari Dinas Pengelolaan Pasar yang berada di urutan ke dua, Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar. Salah satu fungsinya pengelolaan pendapatan pasar dengan melakukan tiga pemungutan retribusi yakni retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pemakaian kekayaan

daerah. Dari ketiga jenis pungutan retribusi tersebut, target tertinggi berasal dari retribusi pelayanan pasar. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.3
Target Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2013
Di Dinas Pengelolaan Pasar

No.	Sumber Pendapatan	Target (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	797.945.000
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	11.273.487.000
3.	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	1.366.710.000

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Besarnya target retribusi pelayanan pasar tidak lepas dari banyaknya jumlah pasar tradisional yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki 43 pasar tradisional. Berikut daftar pasar tradisional di Surakarta :

Tabel 1.4
Daftar Pasar Tradisional di Surakarta

No.	Nama Pasar	Alamat	No.	Nama Pasar	Alamat
1.	Legi	Jl. Jend S. Parman Stabelan BJS	23.	Kliwon	Jl. Kapten Mulyadi Pasar Kliwon
2.	Klewer	Jl. Dr. Rajiman Pasar Kliwon	24.	Kabangan	Jl. Dr. Rajiman Laweyan
3.	Singosaren	Jl. Gatot Subroto Serengan	25.	Mebel	Jl. A. Yani Gilingan Banjarsari
4.	Gede	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Jebres	26.	Ayu Balapan	Jl. Monginsidi Kestalan BJS
5.	Harjodaksino	Jl. Yos Sudarso Serengan	27.	Penumping	Jl. Sutowijoyo Laweyan
6.	Jongke	Jl. Dr. Rajiman Pajang Laweyan	28.	Mojosongo	Jl. Brigjen Katamso Jebres
7.	Nusukan	Jl. Kapten P. Tendean BJS	29.	Pucangsawit	Jl. Ir. Juanda Pucangsawit Jebres
8.	Notoharjo	Jl. Serang Semanggi Pasar Kliwon	30.	Panggungrejo	Jl. Surya Utama Jebres
9.	Ngarsopuro	Jl. Ronggowasito BJS	31.	Ngemplak	Jl. A. Yani Gilingan Banjarsari
10.	Triwindu	Jl. Diponegoro Keprabon BJS	32.	Bangunharjo	Jl. KS. Tubun Manahan BJS
11.	Rejosari	Jl. Sidutan Purwodiningratan BJS	33.	Sidomulyo	Jl. S. Parman Gilingan Bajarsari
12.	Turisari	Jl. RM Said Mangkubumen BJS	34.	Sangkrah	Sangkrah Pasar Kliwon
13.	Purwosari	Jl. Slamet Riyadi Laweyan	35.	Gading	Jl. Veteran Pasar Kliwon
14.	Sidodadi	Kleco/ Jl. Slamet Riyadi Laweyan	36.	Buah Jurug	Jl. KH. Maskur Jebres
15.	Kadipolo	Jl. Dr. Rajiman Laweyan	37.	Tunggulsari	Jl. Untung Suropati Pasar Kliwon
16.	Ledoksari	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Jebres	38.	Mojosongo P	Komplek Jl. Sibela Jebres
17.	Kembang	Jl. Dr. Rajiman Laweyan	39.	Joglo	Jl. Sugiyono Kadapiro BJS
18.	Cinderamata	Barat Alun – alun Utara	40.	Bambu	Jl. Tentara Pelajar Nusukan BJS
19.	Jebres	Jl. Prof. W.Z. Yohanes Jebres	41.	Ngumbul	Jl. RM. Said Manahan BJS
20.	Tanggul	Jl. RE Martadinata Sewu Jebres	42.	Besi Tua	Jl. Serang Semanggi Pasar Kliwon
21.	Depok	Jl. Balekambang Lot/Depok BJS	43.	Proliman	Jl. R. Saleh W Sastro BJS
22.	Ayam	Jl. Serang Semanggi Pasar Kliwon			

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Dinas Pengelolaan Pasar di Kota Surakarta selaku instansi yang diberi wewenang dalam pemungutan retribusi di 43 pasar tradisional selama ini masih kurang maksimal terbukti dari tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Surakarta
Tahun 2012-2014

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2012	11.108.487.000	10.001.440.523	90,03%
2013	11.273.487.000	9.736.335.303	86.36%
2014	12.045.522.000	11.570.191.465	96,05%

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Dari tabel diatas menggambarkan dari tahun 2012 sampai 2014 penerimaan retribusi pelayanan pasar belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 hanya mencapai 90,03 % (dibawah target), tahun 2013 hanya mencapai 86, 36% dan tahun 2014 mencapai 96,05%.

Gambaran mengenai realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut menunjukan bahwa Dinas Pengelolaan Pasar belum dapat menjalankan tugas dengan baik, retribusi pelayanan pasar masih harus terus dioptimalkan sehingga mengalami peningkatan dan mendapat hasil maksimal. Penerimaan retribusi pelayanan pasar merupakan tanggungjawab Dinas Pengelolaan Pasar selaku dinas yang berwenang memungut retribusi pelayanan pasar. Dinas Pengelolaan Pasar bertanggungjawab atas segala pengelolaan retribusi pelayanan pasar sehingga berimplikasi dalam pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan yang nantinya berdampak pada peningkatan PAD Kota Surakarta sebagai sumber pembiayaan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu antara lain : (1) Jurnal Penelitian Inggarwati, Ngadiman dan Muchtar (2013) yang berjudul Strategi Optimalisasi Retribusi

Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman) dengan hasil strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman dengan menggunakan lima indikator sudah baik namun masih ada hambatan yang dihadapi dalam pengoptimalan penerimaan retribusi; (2) Skripsi Julfriner Sitopu (2011) yang berjudul Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar 2011 hasil penelitian DPP Kota Surakarta dalam optimalisasi penerimaan retribusi dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan dan memperkuat proses pemungutan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini ingin melihat dari sisi pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban bagian pendapatan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dilihat

dan ditinjau dari aspek responsivitas, aspek responsibilitas dan aspek akuntabilitas?

2. Apa hambatan pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Pasar dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, menggambarkan dan mendiskripsikan Pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta bidang pendapatan dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilihat dan ditinjau dari aspek responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas.
- b. Untuk mengetahui hambatan pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Pasar dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta untuk memberikan masukan agar lebih bertanggung jawab dalam meningkatkan hasil penerimaan pemungutan restribusi pasar untuk kenaikan PAD Kota Surakarta.
2. Bagi masyarakat luas sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan restribusi pelayanan pasar di Kota Surakarta.

3. Di bidang keilmuan, hasil penelitian bisa digunakan sebagai pengetahuan dalam mengembangkan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang bisa diterapkan semua pihak.
4. Bagi peneliti, digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

